ULTIMATE OUTCOME PD

Meningkatnya digitalisasi pemerintahan

Indikator :Indikator: Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan digital

Intermediate outcome

- Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
  - Indikator : Nilai Keterbukaan Informasi Publik
- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital
  - Indikator : Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital
- Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
  - Indikator : Indeks Pembangunan Statistik
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
  - Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Intermediate outcome

- Meningkatnya keamanan informasi
  - Indikator : Indeks Keamanan Informasi

Immediate outcome

- Meningkatnya jangkauan komunikasi publik pemerintah daerah
  - IK : Tingkat keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat
- Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
  - IK : Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah
  - IK : % Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
- Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
  - IK : % Perangkat daerah yang telah mengintegrasikan data statistik sektoral
- Meningkatnya kinerja perangkat daerah yang akuntabel
  - Indikator :
    1. Persentase Indikator Program yang tercapai
    2. Persentase Realisasi Anggaran
    3. Indeks Profesionalitas ASN (Perangkat Daerah)

Immediate outcome

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi publik
  - IK : % release pemberitaan media pemerintah daerah dan media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah yang sesuai standar
  - IK : % Aduan masyarakat melalui saluran kanal pengaduan milik pemerintah daerah yang ditindaklanjuti
- Meningkatnya pengelolaan infrastruktur E-Government
  - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas Persandian untuk Pengamanan Informasi
  - % insiden keamanan informasi yang ditangani
- Meningkatnya data statistik sektoral yang berkualitas
  - Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal satu data pemerintah daerah
- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja
  - Indikator:
    1. Persentase dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu
    2. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan regulasi dan dokumen perencanaan di atasnya
    3. Persentase dokumen laporan kinerja yang disusun dan ditetapkan tepat waktu
    4. Persentase kesesuai dokumen pelaporan kinerja dan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pedoman SAKIP, serta hasil reviu/Internal audit
    5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan perangkat daerah
  - Indikator:
    1. Persentase laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan
    2. Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan dengan regulasi
    3. Persentase realisasi anggaran
- Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan akuntabel
  - Indikator:
    1. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu
    2. Persentase tingkat ketertiban administrasi dan keakuratan data kepegawaian
- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan urusan perangkat daerah
  - Indikator:
    1. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi
    2. Indeks kepuasan layanan internal yang diberikan
- Meningkatnya kondisi barang milik daerah yang terpelihara secara optimal untuk mendukung layanan kepegawaian
  - Indikator:
    1. Persentase barang milik daerah (BMD) yang dalam kondisi baik/layak pakai
    2. Persentase akurasi data set dan laporan BMD

Kinerja Operasional/Output

- Terlaksananya kerjasama dengan media
  - IK : Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah
- Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - IK : Jumlah laporan pengelolaan media komunikasi publik
- Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan,Opini,dan Aspirasi Publik
  - IK : Jumlah aduan masyarakat melalui saluran kanal pengaduan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah
- Terlaksananya kemitraan dengan pemangku kepentingan
  - IK : Jumlah pemangku kepentingan yang bermitra dalam penyebarluasan informasi publik
- Terlaksananya Pelayanan terhadap Informasi Publik
  - IK : Jumlah Konten yang disebarluaskan di semua kanal media pemerintah
- Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah
  - IK : Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali
- Terlaksananya pembangunan/dan/atau pengembangan Aplikasi
  - IK : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan
- Tersedianya Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
  - IK : Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi
- Terselenggara Akses Internet
  - IK : Jumlah Sebaran Titik Blankspot
- Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan
  - IK : Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian
  - IK : Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota
- Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
  - IK : Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
- Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Statistik
  - IK : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
- Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral
  - IK : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan
- Meningkatnya kuantitas data statistik
  - IK : Jumlah data statistik yang dipersiteh
- **Penyusunan dokumen perencanaan**
  - IK : Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
- **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja**
  - IK : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kinerja
- **Penyusunan laporan capaian kinerja**
  - IK : Jumlah laporan capaian kinerja
- **Pelaksanaan Penatausahaan keuangan**
  - IK : Jumlah laporan penatausahaan keuangan
- **Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan**
  - IK : Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi
- **Penyusunan Laporan Keuangan**
  - IK : Jumlah laporan keuangan lengkap beserta data dukungnya
- **Penyusunan analisis jabatan setiap formasi**
  - IK : Jumlah dokumen analisis jabatan
- **Pelaksanaan administrasi kepegawaian**
  - IK : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
- **Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah**
  - IK : Jumlah dokumen RK BMD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah**
  - IK : Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah
- **Penatausahaan Barang Milik Daerah**
  - IK : Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah
- **Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
  - IK : Jumlah dokumen RK BMD
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
  - IK : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah

Proses

- Mengidentifikasi media yang relevan (media cetak, online, radio, televisi, dan media lokal/regional).
- Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan media
- Menyusun pedoman monitoring opini publik yang selaras dengan kebijakan komunikasi publik nasional.
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama: pemerintah pusat, OPD, DPRD, perguruan tinggi, dunia usaha, media, LSM, komunitas, hingga tokoh masyarakat.
- Menyediakan kanal resmi komunikasi publik: website, media sosial
- Menyusun SOP pelaksanaan pusat kendali
- 1. Menyusun kebutuhan Aplikasi 2. Melakukan pendaftaran aplikasi yang akan dikembangkan
- Melakukan pendaftaran terhadap seluruh sistem layanan yang dimiliki
- Melakukan Pendataan Sebaran titik blankspot
- Melakukan assessment risiko keamanan informasi terhadap sistem pemerintahan (misalnya e-government, aplikasi pelayanan publik, data center).
- Menyelenggarakan sosialisasi literasi keamanan informasi kepada seluruh pegawai.
- Melakukan analisis kebutuhan layanan pemandian (jenis komunikasi yang perlu diamankan, tingkat kerahasiaan dokumen/informasi).
- Melakukan analisis kebutuhan sistem bidang statistik di perangkat daerah
- Menyusun rencana kerja statistik sektoral sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan mengacu pada Rencana Induk Statistik Nasional (RISN) serta Satu Data Indonesia
- Membentuk forum koordinasi statistik sektoral antara Diskominfo, BPS, dan OPD terkait.
- Menyusun rencana kerja
- Melakukan entry data anggaran pada aplikasi
- Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja setiap periode
- Melakukan analisis seluruh indikator kinerja
- Menyusun laporan kinerja perangkat daerah
- Melakukanakan penatausahaan keuangan
- Melakukanakan Rekonsiliasi Keuangan
- Menyusun Laporan keuangan
- Menghimpun data jabatan setiap
- Menghimpun data kepegawaian
- Melakukan analisis kebutuhan barang milik daerah
- Menyusun spesifikasi barang yang dibutuhkan
- Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
- Melakukan analisis kondisi barang milik daerah dengan kondisi rusak berat
- Melakukan pemeliharaan rutin setiap barang milik daerah
- Menentukan tujuan kerjasama (penyebaran informasi pembangunan, klarifikasi isu strategis, kampanye program prioritas).
- Melakukan pemetaan kebutuhan informasi publik yang harus disampaikan pemerintah daerah.
- Menentukan indikator yang akan dimonitor, misalnya:

  persepsi masyarakat terhadap kebijakan daerah.

  tren opini publik (positif, netral, negatif),

  isu strategis dan sensitif,

  aspirasi publik terkait layanan pemerintah.
- Melakukan pemetaan peran dan kepentingan masing-masing stakeholder terhadap program/kebijakan pemerintah daerah.
- Menyusun rencana konten komunikasi publik (agenda tahunan/bulanan/harian).
- Menyiapkan sarana prasarana pusat kendali
- Melakukan monev
- 1. Menyusun Bisnis Proses dan Work Flow Aplikasi yang akan di bangun 2. Menyusun list kebutuhan pengembangan Aplaksi
- Menyusun kebutuhan sistem layanan yang akan di integrasikan sesuai kebutuhan
- Melakukan koordinasi dengg pihak penyedia layanan internet
- Menetapkan klasifikasi dan level keamanan informasi (rahasia, terbatas, internal, publik).
- Melakukan monev
- Menyusun sistektur keamanan informasi pemerintah daerah termasuk skema enkripsi dan manajemen kunci.
- Mengidentifikasi gap kompetensi antara kondisi saat ini dengan standar yang dipersyaratkan (misalnya standar BPS atau regulasi SPBE)
- Melakukan identifikasi kebutuhan data sektoral dari OPD (misalnya kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial)
- Melakukan sinkronisasi dengan standar metodologi BPS agar hasil kegiatan statistik valid dan dapat dibandingkan
- Menyusun strategi komunikasi publik daerah (tema, pesan kunci, kanal media).
- Melakukan pemantauan rutin pemberitaan media, percakapan media sosial, dan forum publik.
- Menentukan prioritas mitra strategis sesuai isu pembangunan yang menjadi fokus (ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dll.).
- Memproduksi konten informatif, edukatif, dan partisipatif (artikel, infografis, video, podcast).
- Melakukan monev
- Melakukanakan proses integrasi
- Menetapkan infrastruktur jaringan yang akan digunakan
- Menyusun rencana strategis keamanan informasi dan standar prosedur operasional (SOP).
- Menyiapkan sarana enkripsi dan pensandian (aplikasi Sandi Elektronik, alat crypto, secure email, VPN pemerintah).
- Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan SDM statistik
- Menetapkan prioritas kegiatan statistik berdasarkan urgensi indikator pembangunan.
- Menetapkan peran OPD sebagai produsen data sesuai domain kewenangannya.
- Menyusun dan mendistribusikan press release, press briefing, konferensi pers terkait program pemerintah daerah.
- Mengadakan pelatihan bersama (workshop jurnalisme data, literasi media) bagi pemerintah dan insan pers.
- Melakukan monev
- Membentuk forum komunikasi multipihak (misalnya forum statistik daerah, forum CSR, forum inovasi pelayanan publik).
- Menggunakan prinsip fact-checking dan verifikasi informasi untuk menangkal hoaks.
- Melakukan monev
- Melakukan monev
- Melakukan proses penyediaan jaringan internet pada titik blankspot
- Melakukan monev
- Menyediakan roadmap layanan pensandian dan keamanan informasi.
- Melakukan monev
- Melakukan monev
- Menyediakan portal data sektoral yang terintegrasi dengan *Satu Data Indonesia*
- Melakukanakan kampanye publik bersama media untuk isu prioritas (misalnya stunting, pajak daerah, pemilu, mediasi).
- Melakukan monev
- Mengembangkan layanan Goverment CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di pemerintah daerah.
- Menyelenggarakan survei, pengumpulan data administrasi, dan kompilasi produk statistik sektoral.
- Menginteg rasikan konten dengan program prioritas pembangunan daerah.
- Membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, polling, maupun interaksi di media sosial.
- Melakukan monev
- Melakukan monev
- Melakukan monev
- Melakukan monev
- Melakukan evaluasi kualitas kegiatan statistik (akurasi, ketepatan waktu, relevansi)
- Melakukan monev

PD PENGAMPU: DISKOMINFO | DISKOMINFO | DISKOMINFO |